



Peranan Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru

The Role of the Social Service in Empowering People with Disabilities in Pekanbaru City

1st Denny Amansyah^a, 2nd Ilham Yuri Nanda^a, 3rd Imam Syahid^a

^a Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah

Alamat email: dennyamansyah2@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City and to find out what are the inhibiting factors in empowering people with disabilities in Pekanbaru City. The indicators used include the Facilitative Role, the Educational Role, the Representative Role, and the Technical Role. This research was conducted at the Pekanbaru City Social Service using descriptive qualitative research methods. Data collection using observation, interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the role of social services in empowering people with disabilities in Pekanbaru City cannot be said to be effective due to several indicators, such as the facilitative role and technical role in which data collection on persons with disabilities has not been carried out evenly and the representational role in which there is still a lack of cooperation with other parties outside in empowering people with disabilities, but in terms of education indicators are going well because all forms of socialization have been carried out by which later can help Pekanbaru City Social Service even has collaborated with PPDI to socialize and carry out activities related to empowering people with disabilities.

Keywords: Role, Disability, Empowerment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru serta mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru tersebut. Indikator yang digunakan meliputi Peran Fasilitatif, Peran Edukasi, Peran Resprementasional, Peran Teknis. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran dinas sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan efektif dikarenakan di beberapa indikator, seperti peran fasilitatif dan peran teknis yang mana pendataan penyandang disabilitas belum terlaksana secara merata dan peran representasional yang mana masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, namun dalam indikator edukasi berjalan dengan baik karena segala bentuk sosialisasi telah dilakukan yang nantinya dapat membantu bahkan Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga telah bekerjasama dengan Pihak PPDI mensosialisasikan serta melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat disabilitas.

Kata kunci: Peran, Disabilitas, Pemberdayaan

I. Pendahuluan

Tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan undang-undang 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social untuk mencapai tujuan Negara tersebut diperlukan pemerintah.

Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintah Nasional menurut UU 1945 diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga nya sendiri, Pembagian daerah atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang dengan

melihat dan mengikat dasar permusyawaratan dalam siding pemerintahan Negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Hutami & Chariri, 2011).

Untuk memperlancarkan dan mempermudah penyelenggaraan di daerah, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun masalah social termasuk kedalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penyelenggaraan social diserahkan kepada daerah karena daerah lebih mengetahui permasalahan di daerahnya sehingga diharapkan dapat mencari solusi dalam pemecahan permasalahan dan juga agar lebih mempermudah dalam melayani Masyarakat (Surianingrat, 1981).

Setiap warga Negara mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat berperan serta dalam pembangunan. Kesempatan yang dimaksud adalah setiap Warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengaktualisasikan dirinya ikut serta sebagai pelaku dalam pembangunan ataupun sebagai penikmat hasil-hasil pembangunan adalah yang mempunyai akses yang cukup diberbagai bidang kehidupan. UUD 1945 memuat pernyataan jelas yang mendorong nondiskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (Hamidi, 2016).

Salah satu kelompok warga Negara yang seharusnya mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai kehidupan adalah penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas tersebut mengakibatkan hambatan/keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari sehingga memerlukan kebutuhan khusus. Salah satu hambatan/keterbatasan penyandang disabilitas adalah memanfaatkan fasilitas umum, terutama bagi mereka yang mempunyai kategori hambatan gerak dan mobilitas.

Penyandang disabilitas yang butuh perhatian pemerintah dalam sarana dan prasarana yaitu:

1. Disabilitas fisik
2. Disabilitas sensorik
3. Disabilitas perkembangan

Disabilitas hanya mempunyai kaki satu misalnya, agar bisa setara menggunakan fasilitas trotoar, maka trotoar tersebut perlu dimodifikasi agar bisa dilalui oleh penyandang disabilitas tunadaksa dan juga memerlukan bantuan alat sebagai pengganti kakinya yang tidak ada.

Dalam hal ini perlu adanya akses untuk penyandang disabilitas. Akses khusus untuk penyandang disabilitas yaitu aksesibilitas. Aksesibilitas adalah ruang bebas hambatan/kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam berpartisipasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan dan transportasi umum.

Adapun penyelenggaran perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian dan kepedulian dari pemerintah, khususnya yang ada di setiap daerah dengan itu pemerintah daerah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Aksesibilitas pada Bab V Pasal 17 :

- 1) setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum lingkungan serta sarana dan prasarana Transportasi
- 2) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berbentuk Fisik dan Non Fisik.

Dalam Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Bagian ketiga Paragraf 1 tentang Sarana dan Prasarana Transportasi Pasal 22. Program pemberian bantuan pemerintah kepada penyandang disabilitas dimaksudkan dapat membantu meringankan beban mereka. Adapun instansi pemerintah daerah Kota Pekanbaru yang mengurus mengenai pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas sendiri ialah Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Keududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak aksesibilitas pada disabilitas dapat dilihat dari kurangnya ketersediaan aksesibilitas tersebut di beberapa tempat atau fasilitas umum di Kota Pekanbaru (Rani & Febrina, 2021).

Dan di Kota Pekanbaru sendiri tidak sedikit jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang belum di berdayakan secara optimal, sehingga menjadikan kehidupan mereka jauh dari yang diharapkan., bantuan yang diberikan pemerintah terhadap penyandang disabilitas selama ini, seperti bantuan alat cacat yang diberikan namun sifatnya tidak menyeluruh, karena tidak semua bisa mendapatkan alat bantu cacat ini. Alat ini tidak dibagikan secara merata karena jumlahnya yang terbatas sehingga bagi yang benar-benar membutuhkan atau pemberiannya dilakukan secara bertahap (Trifira et al., 2022).

Selain dengan adanya bantuan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas yang bahkan baik yang belum menerima bantuan, pemerintah Kota Pekanbaru memberikan bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah sekumpulan manusia yang mempunyai keterbatasan dan banyak hal yang tidak bisa dilakukan para penyandang disabilitas seperti halnya manusia normal lainnya.

Bimbingan sosial yang dimaksudkan disini untuk membentuk karakter penyandang disabilitas yang mandiri, tidak bergantung pada orang lain walaupun mereka mempunyai keterbatasan fisik. Bimbingan ini juga dimaksudkan untuk membantu membangkitkan kepercayaan diri penyandang disabilitas sehingga tidak merasa berbeda dengan orang normal lainnya, memberaikan mereka kepercayaan diri sehingga mereka bangkit dari keterpurukan.

Adapun program-program yang telah di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru ialah rehabilitasi pelatihan kepada penyandang disabilitas pada tahun 2017 untuk mendapatkan keterampilan kerja sesuai dengan keinginan, bakat dan kemampuannya dengan mengirimkan serta memfasilitasi penyandang disabilitas yang ingin memiliki keterampilan kerja.

. Dengan memberikan pelatihan pelatihan dapat membuat mereka menjadi percaya diri dan bertanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka. Penyandang disabilitas juga menjadi tidak bergantung kepada orang lain dan tidak menjadikan kekurangan fisik menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk dapat bekerja atau pun untuk berkretifitas.

Untuk melaksanakan program rehabilitasi pelatihan Dinas Sosial Kota Pekanbaru bekerja sama dengan panti panti yang ada di kota lain seperti Solo, Palembang dan kota lainnya hal ini dikarenakan kota Pekanbaru sementara ini belum memiliki panti rehabilitasi yang khusus melayani penyandang disabilitas. Hal ini tentu saja menjadi kekurangan yang besar mengingat jumlah penyandang disabilitas di kota Pekanbaru saat ini berjumlah lumayan besar.

Adapun penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan, jika masyarakat disabilitas tersebut tidak dimanfaatkan/diberdayakan akan menutup potensi yang terpendam karena disabilitas yang menimpa mereka . Selain itu menegnai fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas belum banyak ditemukan, fasilitas yang di maksud seperti area parkir khusus penyandang disabilitas garis kuning penunjuk jalan bagi penyandang disabilitas yang mengalami kebutaan, toilet khusus disabilitas, dan fasilitas lainnya ditempat umum yang ada di Kota Pekanbaru.

Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi tersebut, pelayanan sosial dan mobilitas para penyandang disabilitas juga kurang terpenuhi dengan layak dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas masih banyak ditemui berupa hambatan arsitekt ural dan prosedural

Berdasarkan data yang didapatkan dapat Dinas Sosial Kota Pekanbaru total penyandang disabilitas tahun 2020-2021 berjumlah 443 orang. Dalam pembahasan ini akan diketahui program bantuan serta bimbingan keterampilan yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas, jawaban tentang peran pemerintah terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah cukup berperan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.

Sedangkan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, penyandang disabilitas per Kecamatan dan berdasarkan jenis – jenisnya adalah 1058 orang pada rentang tahun 2015-2021.

Dengan angka penyandang disabilitas yang cukup tinggi di Kota Pekanbaru maka hal ini seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dengan cara memberi bantuan – bantuan khusus terhadap penyandang disabilitas. Berikut adalah data bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terhadap penyandang disabilitas.

Perhatian yang diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas merupakan bantuan – bantuan yang berasal dari APBN, APBD, APBD Kota Pekanbaru serta CSR. Dari data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru bahwa jumlah bantuan dan jumlah data penyandang disabilitas sangat jauh berbeda, maka dari itu peneliti menemukan bahwa Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru masih kurang optimal dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas di Kota pekanbaru.

Dengan jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru maka peran Pemerintahan terkhusus Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus lebih intensif dikarenakan kesejahteraan penyandang disabilitas harus tetap sama tanpa adanya perbedaan oleh orang normal lainnya, sehingga peneliti menemukan beberapa permasalahan seperti Masih kurangnya sosialisasi mengenai kegiatan aksesibilitas, rehabilitasi/ pemberdayaan, bantuan social dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan social bagi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru, dan Terindikasi belum optimalnya pendataan mengenai jumlah penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru sehingga pelayanan publik yang baik belum merata dilakukan oleh dinas terkait.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapapun tujuan yang hendak diperoleh dari adanya penelitian ini yaitu untuk menegetahui peran dan melihat optimalisasi Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kota Pekanbaru

II. Metode Penulisan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada deskriptif (Rukajat, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mendalami peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Tujuan utama adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana Dinas Sosial berinteraksi dengan masyarakat penyandang disabilitas dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat efektivitas pemberdayaan mereka.

Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini mengarah pada pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual terhadap isu yang sedang dipelajari. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai perspektif, pengalaman, dan pandangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam masalah ini.

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru, dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru akan menjadi subjek utama penelitian. Data akan dikumpulkan melalui tiga teknik utama: observasi, wawancara, dan dokumentasi (Purnomo, 2011). Observasi akan digunakan untuk memahami situasi dan kondisi di lapangan, khususnya dalam hal aksesibilitas dan layanan yang tersedia bagi masyarakat penyandang disabilitas.

Wawancara akan menjadi salah satu alat utama dalam pengumpulan data. Peneliti akan berbicara dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pejabat Dinas Sosial, staf, masyarakat penyandang disabilitas, keluarga mereka, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Wawancara akan berfokus pada pengalaman, persepsi, dan pandangan mereka terhadap peran Dinas Sosial, serta hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam mengakses layanan dan dukungan.

Selain itu, dokumen-dokumen yang relevan juga akan dianalisis (Zuriah, 2006). Ini termasuk peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas, laporan tahunan Dinas Sosial, dan data statistik

terkait populasi penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru. Dokumentasi ini akan memberikan konteks dan landasan hukum untuk penelitian.

Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif melibatkan pengorganisasian, pengelompokan, dan interpretasi data untuk mengidentifikasi pola, tema, dan temuan kunci. Hasil analisis ini akan memberikan gambaran yang mendalam tentang peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Hasil penelitian akan menghasilkan deskripsi yang komprehensif tentang peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mungkin ada, serta memberikan wawasan tentang upaya yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan pemberdayaan mereka. Temuan penelitian akan disajikan dalam bentuk laporan yang terstruktur dan mudah dimengerti.

III. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui lebih jelas tentang Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan beberapa pertanyaan kepada instansi yang berwenang menangani penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru yaitu Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam bentuk wawancara kualitatif.

Adapun peran fasilitator yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dijelaskan langsung Oleh Bapak Drs.Bustami,.MM. Beliau mengatakan bahwa :

“Kalau peran fasilitator kami hanya mengajukan dan mengadakan bantuan yang di inginkan oleh penyandang disabilitas tersebut. Misalnya dia ingin mendapatkan kaki palsu, ya kami bantu untuk mendapatkannya di datangkan tukang ukurnya dan segala bentuk biayanya di tanggung oleh pemerintah pusat.”

Dari wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa dalam bentuk peran fasilitator, dinas sosial sudah melakukan perannya secara optimal dalam membantu masyarakat penyandang disabilitas di Kota Pekanbaru.

Adapun kegiatan atau program yang dijalankan oleh Dinas Sosial terkait dengan Aksesibilitas bantuan sosial, pelatihan, dan pemberdayaan kepada penyandang disabilitas dijelaskan langsung melalui wawancara penulis dengan Ibu Sulhana Lely Am.Keb, selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, beliau menyatakan bahwa :

“ pada saat ini kegiatan ataupun program yang ada adalah pendataan ya, dan itu sudah di lakukan tetapi belum menyeluruh. Karena masih mencari juga orang disabilitas itu, terkadang ada terselip berkasnya juga, ada yang memang tidak terdata. Kalau mengenai bantuan sosial, kita ada yang di ajukan ke perusahaan perusahaan, ada juga yang berasal dari provinsi ataupun pusat, kalau tentang pelatihan sih dulu ada pada tahun 2017 sampai 2018, tapi 2018 kasi-nya jabatannya kosong, jadi tidak bisa berjalan. Namun sekarang sudah dilakukan lagi”

Dari hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa program seperti pendataan masyarakat penyandang disabilitas sudah di laksanakan tetapi belum di lakukan secara optimal dikarenakan beberapa faktor. Sedangkan bantuan sosial yang di berikan kepada penyandang disabilitas berasal dari provinsi ataupun pusat atau bantuan dari perusahaan-perusahaan.

Namun disamping itu kendala-kendala yang di sebabkan oleh pendataan yang tdiak bisa menyeluruh juga tidak bisa dikesampingkan, hal itu dijelaskan oleh Bapak Drs.Bustami,.MM. Selaku Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Beliau menjelaskan bahwa :

“ kebanyakan kendala pemberian bantuan itu ya di NIK ya, sedangkan banyak keluarga penyandang disabilitas ini yang tidak ada KK, sedangkan syarat mendapatkan bansos ya harus ada NIK, dan foto rumah sampe kamar mandi dan 80% masih tanah, sedangkan di Kota Pekanbaru setidaknya rumah 50% nya sudah semi permanen kan. Terus juga mengenai syarat harus ada NIK, masih banyak orang tua yang tidak mau memasukkan anaknya kedalam KK tersebut, entah apa alasannya, sehingga kan lebih sulit melakukan pendataan, kalau dari dinasnya mau saja datang ke tempat untuk melakukan pendataan tapi kan kalo bisa mereka dikumpulkan dalam satu tempat itu lebih efektif dari pada datang kerumah penyandang disabilitas itu satu persatu”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sulitnya melakukan pendataan dikarenakan banyak faktor, jika kendala itu yang dari internal Dinas Sosial, sudah dilakukan pengopimalan, bahkan Dinas Sosial turun langsung untuk melakukan pendataan kepermukiman penyandang disabilitas tersebut, namun jika kendala tersebut berasal dari eksternal Dinas Sosial Kota, hal tersebut lah yang sulit untuk di atasi.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara mengenai bantuan sosial yang di berikan, bantuan tersebut juga harus tepat sasaran, sehingga tepat guna. Maka yang bisa mendapatkan bantuan sosial ataupun pelatihan tersebut harus sesuai dengan kualifikasi yang ada, adapun syarat – syarat penyandang disabilitas yang bisa mendapatkannya di jelaskan oleh Ibu Sulhana Lely Am.Keb, beliau menyatakan :

“ kalau penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan harus di lihat lagi, ia mampu atau tidak, kalau ia berasal dari keluarga yang mampu ya kita gak bisa kasih, kita coba cari yang lain yang lebih membutuhkan, terus terdaftar gak dia di data DTKS (Data Terpadu Keluarga Sejahtera), begitu ”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat disabilitas memiliki kualifikasi tersendiri untuk dapat menerima bantuan sosial dan juga pelatihan. Hal tersebut bertujuan agar bantuan yang di berikan memang jatuh kepada orang yang layak mendapatkannya, bukan penyandang disabilitas yang mampu secara finansial atau dari latar belakang keluarga yang berada.

Mengenai respon dari masyarakat penyandang disabilitas sendiri terhadap segala tindakan upaya pemenuhan hak masyarakat disabilitas, maka penulis mewawancarai salah seorang penyandang disabilitas yaitu Bapak Udin yang pendapatan sehari-harinya berasal dari hasil berjualan sang istri di pasar, beliau mengatakan bahwa:

“ untuk bantuan langsung dari pemerintah saya belum ada dapat selama ini, kalau tentang pendataan, sayakan hidup pindah pindah karena rumah ngontrak, kalo disini sih udah 10 tahun, udah coba urus pendataannya ke RT tapi belum juga ada dapat bantuan, sekedar beras aja belum dapat, karena KK nggak ada katanya, mau di urus cuma susah, jadi ya di biarkan aja ”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kembali kepada anggota keluarga (Istri) salah satu masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Kota Pekanbaru yaitu Ibu Rini, beliau menyamoikan bahwa:

“ Saya ni kan dari teluk jering hidup pindah pindah, kalau pendataan gitu nggak ada, dulu ada orang yang minta foto, tanya Tanya juga, tapi sampai sekarang belum ada dapat bantuan lagi”

Untuk memperkuat hasil wawancara, maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu penyandang disabilitas yaitu bapak Syahrial, beliau menyatakan bahwa :

“ untuk bantuan sendiri saya sudah mendapatkan yaitu berupa kursi roda yang saya pakai ini, dan pendataan pun sudah pernah di lakukan pada sekitar tahun 2020”

Setelah melakukan wawancara dengan bapak Syahrial peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang penyandang Disabilitas yang bernama Wahyu beliau menyatakan bahwa :

“ saya sudah mendapatkan bantuan beberapa kali dari dinas sosial karena saya Cuma hidup berdua dengan kakak , untuk bantuan itu sendiri berbeda – beda mulai dari sembako serta alat bantu untuk saya berjalan yaitu berupa tongkat yang saya gunakan saat ini”

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masih belum menyeluruhnya pendataan dan bantuan sosial yang di berikan. Apalagi terhalang dengan kondisi masyarakat disabilitas yang tempat tinggalnya tidak tetap, sehingga menyulitkan petugas untuk mencari lalu mendata langsung.

Peran fasilitatif tidak berhenti sampai disitu saja, namun harus tetap di lihat dari segi sarana dan prasarana yang telah di siapkan untuk menunjang kebutuhan fasilitas khusus penyandang disabilitas di ruang public, apakah sudah tersedua atau belum. Maka Ibu Sulhana Lely Am.Keb selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas Mengungkapkan :

“Kalo mengenai sarana dan prasarana terkait penyandang disabilitas ini ya semuanya di sediakan dan di bangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, kami cuma memantau saja, jadi mengenai lokasi dan jumlah sarana prasarana yang dibangun kami enggak ada megang, semua di PU. Kalo sarana prasarana khusus dari kami tidak ada, walaupun misalnya ada dilakukan pelatihan masyarakat disabilitas itu sendiri pergi dengan mandiri, begitu”.

Dari wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa segala bentuk pengadaan fasilitas publik termasuk fasilitas khusus penyandang disabilitas, di lakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial Kota Pekanbaru pun tidak bisa memastikan dimana saja dan berapa banyak jumlah fasilitas public khusus bagi penyandang disabilitas didirikan di Kota Pekanbaru.

Maka Peran fasilitatif Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara keseluruhan belum dapat di katakan optimal. Alasannya adalah masih terdapatnya masyarakat disabilitas yang belum di data secara jelas sehingga menyulitkan masyarakat disabilitas tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial, pelatihan, ataupun di berdayakan. Mengenai pelatihan sendiri hanya di lakukan setiap bulan sekali, dan tidak banyak masyarakat disabilitas yang mengetahui program tersebut, yang tentunya berpengaruh terhadap jumlah penyandang disabilitas yang bisa mandiri dengan keterampilan yang mereka miliki.

A. Peran Edukasi

Peran edukasi tentunya di butuhkan bagi setiap lapisan masyarakat , termasuk penyandang disabilitas. Apalagi dilihat dari keterbatasan yang di miliki oleh penyandang disabilitas tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk mencari informasi dan pengetahuan secara mandiri. Oleh sebab itu, Dinas sosial selaku instansi yang berwenang mengenai hal tersebut, harus melakukan langkah-langkah yang tepat dan cermat agar informasi apapun dapat sampai ke masyarakat tersebut.

Edukasi tentunya erat kaitannya dengan mensosialisasikan suatu program atau kegiatan yang nantinya berguna bagi suatu kelompok ataupun secara menyeluruh. Dalam hal ini pentingnya Dinas Sosial melakukan sosialisasi kepada setiap lapisan masyarakat mengenai penyandang disabilitas, baik bagi masyarakat biasa yang nantinya dapat membangun kesadaran untuk saling membantu dan menimbulkan rasa toleransi yang lebih tinggi terhadap masyarakat disabilitas. Bagi masyarakat disabilitas sendiri tentunya sosialisasi tersebut akan berguna bagi mereka pribadi. Dalam hal ini Dinas Sosial telah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pemberdayaan masyarakat, Hal tersebut di jelaskan langsung oleh Ibu Sulhana Lely Selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Dan Penyandang Disabilitas :

“ untuk sosialisasi sendiri, Dinas Sosial turun langsung ke rumah masyarakat penyandang disabilitas tersebut untuk mensosialisasikan mengenai program-program apa saja yang terkait dengan pemberdayaan disabilitas. Kami juga bekerja sama dengan PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) untuk sosialisasi tersebut”.

Mengenai respon dari masyarakat penyandang disabilitas sendiri terhadap segala tindakan upaya pemenuhan hak masyarakat disabilitas, maka penulis mewawancarai salah seorang penyandang disabilitas yaitu Bapak Udin beliau mengatakan:

“ kalau mengenai sosialisasi itu ada, namun kalau di bilang bantuan saya belum pernah dapat semenjak saya tinggal di sini selama 10 tahun, kalau cuma sosialisasi saja kan tidak membantu saya secara kebutuhan, yang saya perlukan bantuan dari pihak terkait”.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan sosialisasi Dinas Sosial langsung menyambangi kediaman rumah penyandang disabilitas untuk melakukan sosialisasi. Hal tersebut tentunya mempermudah masyarakat disabilitas untuk mendapatkan informasi dengan jelas dan akurat, meskipun dalam faktor efisiensi waktu kurang tepat, karena harus memberikan informasi satu persatu. Adapun sosialisasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun agar terciptanya visi dan misi yang diharapkan.

Di lapisan masyarakat penyandang disabilitas, masih banyak terdapatnya rasa kurang percaya diri untuk tampil di ruang public ataupun untuk dapat bersaing dalam dunia kerja karena keterbatasan yang dimiliki. Maka perlunya edukasi yang berisi semangat dan dorongan kepada penyandang disabilitas tersebut agar tidak minder di lingkungan sosialnya. Namun tidak sedikit kurangnya kepercayaan diri tersebut timbul dikarenakan keluarga yang kurang mendukung seperti yang dijelaskan oleh Drs.Bustami.MM selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Beliau menjelaskan bahwa:

“Minder itu bisa juga karena perlakuan dari keluarga ya, seperti kurang memberi motivasi dan dukungan, atau malah merasa malu karena salah satu anggota keluarganya ada yang cacat padahal itu tidak boleh itukan sudah takdir, ya harus menerima meskipun berat, jadinya mental penyandang disabilitas tersebut dapat percaya diri kan”

Hal ini dijelaskan juga langsung oleh Ibu Sulhana Lely selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Dan Penyandang Disabilitas:

“iya kadang memang masih ada yang takut untuk keluar bebas, bahkan untuk adaptasi dengan tetangga karena kekurangannya itu, tapi disini kami sebagai instansi yang berwenang dalam memberdayakan masyarakat disabilitas sudah memberikan sosialisasi yang tujuannya untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri mereka lewat ajang pelatihan, jadinya mereka punya bakat, punya skill yang bisa jadi value bagi mereka sendiri”

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sedala bentuk sosialisasi baik yang berisi mengenai program ataupun kegiatan atau sekedar motivasi dan semangat telah dilakukan secara rutin oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Namun dikarenakan jumlah masyarakat penyandang disabilitas yang tidak sedikit, sosialisasi tersebut belum bisa menyeluruh dilakukan, apalagi mengingat data mengenai masyarakat disabilitas juga belum lengkap secara keseluruhan.

Sementara itu dalam melakukan segala bentuk kegiatan atau program, tentunya Dinas Sosial berkolaborasi dengan beberapa organisasi lain baik pemerintahan ataupun non pemerintahan demi tercapainya visi dan misi yang diinginkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ibu Sulhana Lely selaku Kasi Rehabilitasi Sosial Dan Penyandang Disabilitas :

“Kalau instansi pemerintahan yang membantu secara intens sih belum ada ya, karena disabilitas ini memang wewenangnya dinsos, tapi kalo diluar itu ada, seperti PPDI tadi, karena PPDI kan cakupan organisasi yang cukup luas juga, di provinsi ataupun kota mereka ada, jadi untuk saling membantu dalam mensosialisasikan atau melakukan kegiatan khusus disabilitas juga lebih mudah “.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa PPDI memiliki peranan yang cukup penting dalam membantu kegiatan ataupun program khusus disabilitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari lokasi sosialisasi mengenai penyandang disabilitas ini juga dilakukan di kantor PPDI setempat dan petugas dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga ikut serta di dalamnya, selain dengan petugas dinas sosial langsung ke rumah masyarakat disabilitas untuk melakukan sosialisasi.

Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial untuk memberdayakan masyarakat Disabilitas, dapat dilihat seberapa pentingnya pemberdayaan masyarakat disabilitas ini dilakukan. Tujuan utamanya tidak lain agar masyarakat disabilitas itu sendiri mampu untuk hidup mandiri, dan tidak bergantung dengan belas kasihan orang lain, sehingga kehidupannya lebih layak dikarenakan mampu menepi kebutuhan hidupnya yang berasal dari keahlian yang dapat dipelajari selama melakukan pelatihan yang ada.

Maka Peran Edukasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sejauh ini berjalan dengan baik dan optimal. Di karenakan segala bentuk edukasi sudah dilakukan, bahkan Dinas Sosial juga bekerja sama dengan PPDI untuk dapat melakukan sosialisasi kegiatan atau pelatihan dengan menyeluruh.

Peran edukasi dalam pembangunan masyarakat adalah suatu elemen yang tak terpisahkan dari upaya mencapai inklusi sosial, kesetaraan, dan kemajuan (Rahmi, 2020). Dalam konteks penyandang disabilitas, edukasi menjadi kunci untuk memberdayakan mereka dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat.

Edukasi untuk penyandang disabilitas adalah sebuah sarana untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin mereka alami dalam akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan peluang. Dalam hal ini, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya mendapatkan akses fisik ke berbagai program dan layanan, tetapi juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk menjadi lebih mandiri (Breckenridge, 2021).

Dalam kesimpulan, peran edukasi dalam pembangunan masyarakat yang inklusif melibatkan sosialisasi, pembentukan dukungan sosial, dan kolaborasi dengan organisasi lain. Ini adalah langkah penting dalam memberdayakan penyandang disabilitas dan memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang setara dalam masyarakat. Selain itu, Dinas Sosial juga harus terus memantau dan mengevaluasi program-program edukasi yang ada untuk memastikan bahwa mereka efektif dalam mencapai tujuan inklusi dan pemberdayaan.

B. Peran Representasional

Peran representasional sendiri ialah melakukan interaksi dengan pihak luar bagi kepentingan masyarakat dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut tentunya harus dilakukan di setiap instansi yang menaungi urusan-urusan publik contohnya seperti bekerja sama dengan badan dan instansi lainnya demi mewujudkan visi dan misi yang diinginkan. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru melakukan peran representasionalnya selaku instansi yang berwenang dalam mengurus dan melayani mengenai masyarakat penyandang disabilitas.

Dinas Sosial kota pekanbaru tentunya membutuhkan anggaran dalam melayani dan melakukan kegiatan dalam pemberdayaan masyarakat, pendanaan tersebut haruslah di anggarkan dengan seefisien mungkin sehingga pemanfaatannya sendiri dapat dirasakan. Mengenai anggaran dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat sendiri berasal dari beberapa sumber, hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Sulhana Lely selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas, beliau menjelaskan :

“ kalo mengenai pendanaan, anggarannya dari kita sendiri, dari dinas. Sedangkan dari instansi atau bantuan dari pihak luar belum ada, atau juga pendanaannya ada bantuan juga dari provinsi ataupun pusat. begitu”.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya bantuan pendanaan dari pihak luar, apalagi seperti donasi dan lain sebagainya. Segala pembiayaan di tanggung oleh pemerintah kota sendiri. Namun meskipun demikian, dalam hal lain seperti kerja sama dalam melakukan kegiatan program pemberdayaan, ada beberapa pihak yang ikut berpartisipasi, hal tersebut disebutkan langsung oleh Ibu Sulhana Lely selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas, beliau menyatakan bahwa :

“ kalo kerjasama tentunya ada seperti dengan PPDI sama DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), seperti ada beberapa waktu lalu kita buat program yang berfokus buat anak anak disabilitas, nah kita bekerjasama dengan mereka, seperti program kota layak anak kemarin”.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kolaborasi antar instansi dalam melakukan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan dengan optimal. Hal tersebut tentunya membantu dalam mempermudah kegiatan dan program agar terlaksana dengan efektif dan menyeluruh. Peran Representasional juga membahas mengenai gebrakan baru dalam meluncurkan visi dan misi yang diinginkan, seperti melakukan inovasi baru dalam menjalankan tugas, inovasi tersebut tentunya diperlukan agar program-program baru dapat tercipta dan lebih unggul dari program sebelumnya. Inovasi baru dalam pemberdayaan masyarakat disabilitas dijelaskan oleh Ibu Sulhana Lely selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas, beliau menyatakan bahwa :

“ untuk inovasi baru jujur aja belum ada, karna kasi penyandang disabilitas ini juga baru di isi beberapa bulan terakhir, sehingga dalam beberapa waktu terakhir kami hanya melakukan kegiatan kegiatan yang kemarin sempat mandek, seperti pelatihan, sekarang udah rutin lagi di lakukan, mungkin kedepannya baru mencanangkan inovasi baru setelah kegiatan kegiatan sebelumnya terlaksana dengan optimal”.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi dari Dinas Sosial mengenai pemberdayaan masyarakat belum dapat dilakukan, dikarenakan beberapa faktor, seperti kasi penyandang disabilitas yang sempat kosong sehingga menunda kegiatan kegiatan yang seharusnya terlaksana. Oleh sebab itu, untuk saat ini Dinas Sosial sedang berfokus kepada mengoptimalkan kegiatan-kegiatan atau program yang sudah ada terlebih dahulu.

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peran representasional sangat penting. Ini tidak hanya tentang mengelola program dan layanan, tetapi juga berbicara atas nama masyarakat yang memerlukan dukungan. Pihak berwenang seperti Dinas Sosial memiliki tanggung jawab untuk berinteraksi dengan pihak luar, mencari sumber daya tambahan, dan menjalin kemitraan dengan organisasi lain. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa masyarakat penyandang disabilitas tidak hanya memiliki akses fisik ke layanan, tetapi juga mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk hidup mandiri (*Pemenuhan Pelayanan Yang Aksesibel Pada Penyandang Disabilitas Di Dinas Dukcapil Kota Jayapura - Ombudsman RI*, n.d.).

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Dalam banyak kasus, sumber daya pemerintah terbatas. Oleh karena itu, kerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan pihak swasta dapat menjadi kunci dalam meningkatkan pendanaan dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Dinas Sosial, sebagai perwakilan pemerintah, harus proaktif dalam menjalin kemitraan ini untuk memaksimalkan dampak positif pada masyarakat disabilitas (Saputro et al., 2015).

Dalam pandangan ahli, peran representasional bukan hanya tentang mendapatkan sumber daya tambahan, tetapi juga tentang mewujudkan inovasi dalam pemberdayaan. Inovasi adalah elemen kunci dalam memperbaiki kualitas layanan pemberdayaan masyarakat. Dinas Sosial harus berani untuk mencari cara-cara baru untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Ini bisa berarti menciptakan program baru, merancang pendekatan pelatihan yang lebih efektif, atau

memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses. Inovasi dapat membantu menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Husni Mubarak, 2020).

Hasil dari wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa mengenai peran representasional Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih belum optimal secara keseluruhan di karenakan masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, padahal kerjasama tersebut dapat berupa bantuan sosial seperti dana yang nantinya dapat membantu menyejahterakan penyandang disabilitas itu sendiri.

C. Peran Teknis

Peran teknis dalam suatu instansi pemerintahan merupakan peran yang berkaitan dengan hal-hal teknis dalam membantu proses pengembangan masyarakat. Seperti pendataan mengenai masyarakat secara cermat dan menyeluruh sehingga segala bentuk pelayanan administratif akan lebih optimal, disamping itu pendataan yang tepat dapat membantu dinas terkait dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan dan program, hal tersebut juga di lakukan oleh Dinas Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, hal ini di jelaskan langsung oleh Ibu Sulhana Lely Am.Keb selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan bahwa :

“ mengenai pendataan belum bisa di lakukan secara optimal karena beberapa faktor, kita harus mencari juga masyarakat disabilitas itu, kadangkala mereka juga hidupnya ga menetap, terus juga ada yang enggan untuk datang mendatakan dirinya langsung ke kantor, jadi harus dinas yang lebih banyak mencari, dan itu perlu waktu”

Dari wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa pendataan masyarakat penyandang disabilitas belum berjalan secara optimal di sebabkan karena masyarakat disabilitas tersebut tidak tinggal menetap sehingga mempersulit dinas terkait melakukan pendataan secara optimal. Adapun waktu pendataan masyarakat penyandang disabilitas tersebut dilakukan secara rutin, hal tersebut di sampaikan oleh oleh Ibu Sulhana Lely Am.Keb selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan bahwa :

“ pendataan nya tetap dilakukan secara rutin yaitu setiap tahun, biasanya di bulan januari sampai februari, baik pendataan langsung terjun ke rumah masyarakat penyandang disabilitas ataupun pendataan masyarakat disabilitas yang langsung kekantor ataupun melalui RT atau RW tempat domisili mereka. begitu”

Dari wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa pendataan jumlah penyandang disabilitas terus rutin di lakukan demi mempermudah segala bentuk pelayanan baik seperti bantuan sosial ataupun program pelatihan guna memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas tersebut. Peran teknis lainnya dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas juga tersalurkan dengan mengadakan fasilitas khusus penyandang disabilitas pada saat melakukan pengurusan surat administrasi di kantor pemerintahan, hal tersebut di jelaskan oleh Ibu Sulhana Lely Am.Keb selaku Kasi Rehabilitasi Sosial dan Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau menjelaskan bahwa :

“ iya jadi kalau masyarakat penyandang disabilitas tersebut mau mengurus surat surat mereka tidak perlu antrian, bisa langsung di layani, kenapa bisa begitu, karena mereka disertakan dengan surat dari PPDI tadi, misal mereka mengurus surat ke disdukcapil itu langsung aja, gak pake antrian lagi, karena KTP penyandang disabilitas sama KTP biasa itu berbeda bentuknya, jadi pengurusannya juga beda”

Mengenai respon dari masyarakat penyandang disabilitas sendiri terhadap segala tindakan upaya pemenuhan hak masyarakat disabilitas khususnya dalam bidang administrasi, maka penulis mewawancarai salah seorang penyandang disabilitas yaitu Bapak Udin beliau mengatakan bahwa:

“ saya sudah pernah mengajukan ke RT/RW untuk diurus namun ketika ditanyakan tidak pernah ada jawaban, dan saya pun kalau mau ke disdukcapil kami tidak mempunyai kendaraan, maka dari itu saya tidak bisa mengurus KK”.

Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa mengenai peran teknis, Dinas Sosial telah melakukan segala cara demi mengoptimalkan hal tersebut, seperti pendataan, meskipun belum terlaksana dengan optimal, namun Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap mengusahakan agar pendataan tersebut dapat terlaksana dengan menyeluruh dan akurat.

Dari uraian percakapan di atas, dapat disimpulkan bahwa Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas sudah dapat dikatakan optimal dikarenakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah melaksanakan langkah-langkah yang tepat demi tercapainya tujuannya yaitu memberdayakan masyarakat disabilitas di Kota Pekanbaru, seperti melakukan pelatihan sesuai dengan keinginan dan bakat penyandang disabilitas tersebut, memberikan bantuan sosial secara rutin kepada masyarakat penyandang disabilitas, hal hal seperti itulah yang menjadi alasan bahwa peran dinas sosial kota pekanbaru sudah melakukan perannya secara optimal.

Adapun faktor – faktor penghambat Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas antara lain:

1. Dilihat dari indikator Peran Fasilitator , yang mana peran tersebut dilihat dalam bentuk dinas tersebut memberikan fasilitas yang membantu masyarakat disabilitas, dalam hal ini belum dapat sepenuhnya di jalankan karena terhalang beberapa faktor seperti pada saat melakukan program pelatihan dan bantuan sosial yang sempat terhenti dikarenakan kepengurusan kasi di dinas sosial kota pekanbaru yang sempat kosong sehingga berdampak kepada tidak optimalnya pelayanan yang di berikan kepada masyarakat penyandang disabilitas
2. Di lihat dari indikator Peran Edukasi, yang mana peran tersebut dapat dilihat dari seberapa intensnya Dinas Sosial melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi terkait penyandang disabilitas tersebut. Tetapi penulis menemukan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat penyandang disabilitas mengenai program ataupun pelatihan, karena terbatasan media massa yang di miliki, seperti televisi dan smartphone, sehingga mengurangi akses masyarakat disabilitas untuk mengetahui hal tersebut.
3. Di lihat dari indikator Peran Representasional, peran tersebut dapat di lihat dari kerjasama anatr instansi dalam mewujudkan tujuan yang sama yaitu pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas. Dalam hal ini terjadi beberapa kendala seperti masih minimnya kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah ataupun non pemerintahan dalam melakukan program khusus penyandang disabilitas, yang mana seharusnya dengan banyaknya pihak yang bekerjasama dalam mengsucceskan pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, akan semakin banyak pula pihak pihak yang terbantu dengan kegiatan tersebut seperti penggalangan dan, ataupun bantuan sosial.
4. Di lihat dari indikator Peran Teknis, dapat di lihat dari seberapa optimalnya pendataan yang di lakukan oleh dinas sosial kepada masyarakat penyandang disabilitas, namun dalam hal ini pendataan tersebut belum dapat dilakukan secara menyeluruh dikarenakan beberapa kendala seperti masyarakat penyandang disabilitas yang tidak tinggal secara menetap dan berpindah pindah menyulitkan dinas sosial untuk mendata masyarakat disabilitas tersebut.

pembahasan atas permasalahan dengan menggunakan teori atau kerangka pemikiran sebagai pisau analisis sehingga menjadi satu kesatuan.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan masing – masing bab yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat dilihat bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru, kemudian dilanjutkan dengan saran sebagaimana mestinya sesuai dengan pendapat peneliti.

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Memberdayakan Masyarakat Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru, di lihat dari indikator Peran fasilitatif Dinas Sosial Kota Pekanbaru secara keseluruhan belum dapat di katakan optimal dikarenakan masih terdapatnya masyarakat disabilitas yang belum di data secara jelas sehingga menyulitkan masyarakat disabilitas tersebut untuk mendapatkan bantuan sosial, pelatihan, ataupun di berdayakan.
2. Di lihat dari indikator Peran Edukasi yang di lakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru sejauh ini berjalan dengan baik dan optimal. Di karenakan segala bentuk edukasi sudah di lakukan, bahkan Dinas Sosial juga bekerja sama dengan PPDI untuk dapat melakukan sosialisasi kegiatan atau pelatihan dengan menyeluruh.
3. Di lihat dari indikator peran representasional Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih belum optimal secara keseluruhan di karenakan masih kurangnya kerjasama dengan pihak luar dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas, padahal kerjasama tersebut dapat berupa bantuan sosial seperti dana yang nantinya dapat membantu menyejahterakan penyandang disabilitas itu sendiri.
4. Di lihat dari indikator peran teknis, Dinas Sosial telah melakukan segala cara demi mengoptimalkan hal tersebut, seperti pendataan, meskipun belum terlaksana dengan merata, namun Dinas Sosial Kota Pekanbaru tetap mengusahakan agar pendataan tersebut dapat terlaksana dengan menyeluruh dan akurat.

B. Saran

Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat penyandang disabilitas merupakan bagian dari tupoksi kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang seharusnya dijalankan dengan optimal agar visi dan misi yang di harapkan dapat tercapai, namun dalam pelaksanaannya sering terdapat hambatan yang telah di perkirakan akan terjadi ataupun yang tidak terduga sekalipun. Maka agar meminimalisir hal tersebut sekiranya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, harus lebih memperluas cakupan wilayah pencarian, tidak hanya menasar kepermukiman ataupun rumah tinggal masyarakat penyandang disabilitas tersebut, namun bisa juga dengan menyisir di beberapa ruas jalan Kota Pekanbaru, yang kadang kala sering terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang sekedar mencari nafakh dengan cara mengemis, sehingga pendataan bisa lebih cepat di lakukan dan lebih efektif dan efisien.
2. Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, tidak hanya memberikan edukasi dan wawasan kepada masyarakat disabilitas saja, namun juga harus meyasar setiap lapisan masyarakat, yang tujuannya untuk meningkatkan rasa simpati dan kepedulian antar sesama, sehingga nantinya masyarakat penyandang disabilitas dapat tampil secara aktif di ranah publik tanpa merasa tidak percaya diri di lingkungan sosial
3. Terkait bantuan sosial, pelatihan, ataupun pemberdayaan sebaiknya Dinas Sosial Kota Pekanbaru menggait pihak luar untuk dapat mengsucceskan program yang ada agar mempermudah masyarakat penyandang disabilitas untuk mendapatkan bantaun sosial, pelatihan, dan juga pemberdayaan

4. Terkait mengenai peran dinas sosial kota Pekanbaru dalam memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas, seharusnya mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru terkait dengan program penyandang disabilitas, sehingga peran dinas terkait tidak hanya sebatas memberikan bantuan sosial, pelatihan, ataupun pemberdayaan, namun lebih dari itu sehingga kehidupan masyarakat penyandang disabilitas dapat lebih baik dan layak dengan inovasi baru yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersebut.

Daftar Pustaka

- Breckenridge, J. (2021). Spoken word as therapy and power. In *Spoken Word in the UK*. <https://doi.org/10.4324/9780429330223-34>
- Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(4). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7>
- Husni Mubarak, -. (2020). *Peran Dinas Sosial Dalam Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Kabupaten Bondowoso*.
- Hutami, G., & Chariri, A. (2011). Pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah. *Universitas Diponegoro*, 1.
- Pemenuhan Pelayanan yang Aksesibel pada Penyandang Disabilitas di Dinas Dukcapil Kota Jayapura - Ombudsman RI. (n.d.). Retrieved November 2, 2023, from <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal-pemenuhan-pelayanan-yang-aksesibel-pada-penyandang-disabilitas-di-dinas-dukcapil-kota-jayapura>
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Purnomo, B. H. (2011). Metodologi dan teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas (classroom action research). *Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 210251.
- Rahmi, F. N. (2020). Teknologi Komunikasi Dalam Implementasi Nilai Inklusi Bagi Penyandang Disabilitas. *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 11(2). <https://doi.org/10.31506/jrk.v11i2.9483>
- Rani, N. P., & Febrina, R. (2021). Hak Aksesibilitas pada Disabilitas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.30652/jih.v10i1.8078>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (1st ed.). Deepublish.
- Saputro, S., Indarty, W. T., Setyowati, K., Makmuroch, D., Tuhana, Gravitiani, E., Saddhono, K., & Noviani, L. (2015). Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas. In *Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs Indonesia*.
- Surianingrat, B. (1981). Memahami Ilmu Pemerintahan. In UGM Press.
- Trifira, S., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Mal Pelayanan Publik Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issues*. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i2.50>
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- Zuriah, N. (2006). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: teori-aplikasi*. Bumi Aksara.